

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Abror, M. D., & Hidayah, L. 2021. *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat Pembuat Akta Kelahiran di UPT Dispendukcapil Kecamatan Purwosari*. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 5(2).
- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta
- Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta
- Agus Dwiyanto, 2010, *Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Ahmad, Badu. 2018. *Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo. Yogyakarta
- Dahyar Daraba, 2019, *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (Parang: Penerbit Leisyah)*.
- Deddy Mulyadi, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Eny Kusdarini, 2019. *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta.
- Hamka, 2005. *Tafsir Al-Azhar Juz V*. Pustaka Panjimas. Jakarta
- Hardiyansyah, 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Gava Media. Yogyakarta
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Hasnizar, R. 2015. *Birokrasi Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 13 (02).
- Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok
- _____, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ijan Poltak Sinambela. 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Juriko Abdussamad, "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo", Jurnal Manajemen Sumber daya Manusia, Administrasi Dan Pelayan Publik VI, no 1,(2019), 79-82. <https://stia-banatararuna.e-journal.id/PUBLIK/articke/view/6>
- K., N. A., & Lituhayu, D. 2017. *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil*. Journal of Public Policy and Management Review, 6(3).
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN, Jakarta.

- Lijan Poltak Sinambela, dkk., 2006, Reformasi Pelayanan Publik :Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara. Jakarta.
- Lukman Santoso, 2013. Hukum Pemerintahan Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia.
- M. Makhfudz, 2013. Hukum Administasi Negara. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Marbun, S,F, 2013, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta
- Moekijat. 2008. *Administrasi Perkantoran*. Mandar Maju. Bandung
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government And Good Governance*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Mulyadi, Deddy, Hendrik T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandi 2016. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Nauval Amin Mahmud, 2021, "Efektifitas Inovasi pelayanan Publik We Are Ready Kentongan Online Berbasis Android Polres Jember", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)
- Nitaria Angkasa, 2019, Hukum Administrasi Negara, Laduny Press, Metro Lampung.
- Pasolog, Harbani, 2017. *Teori Administrasi Publik*.Alfabeta. Bandung
- Prasojo, Eko. 2006. *Kinerja Pelayanan Publik Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi dalam Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan*. Yappika. Jakarta.
- Putra Fadhilla, 2014, *New Public Governmance*, UB Press, Malang.
- Sahya Anggara, 2014, Kebijakan Publik, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya BaktiDominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sinambela, L. P. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang.
- Sirajudin, Didik Sukrino, dan Winardi, 2012, Hukum pelayanan Publik, Setara Press. Malang.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, PT. Grafindo Persada. Jakarta

II. Lain-Lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Kemendagri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.